



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BASO SALEH**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **268155**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **975.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/154 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/36 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **75.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA G Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **23.500.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **47.435.656**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **1.121.435.656**

III. HUTANG Rp. **189.965.106**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **931.470.550**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BOBY SATRIYO SULEMAN
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 494586

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 60.000.000

1. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 793.349

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 980.793.349

III. HUTANG Rp. 134.333.322

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 846.460.027

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHRISTIANY JUDITHA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 626132

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 147.000.000

1. MOBIL, DATSUN DATSUN GO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, KIJANG KIJANG LGX Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRAX Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 766.653.982

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.713.653.982

III. HUTANG Rp. 141.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.572.653.982

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DOMINGGU LUDJI
2. Jabatan : KEPALA LOKA
3. NHK : 699523

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m²/465 m² di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m²/2 m² di KAB / KOTA KOTA KUPANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 238 m² di KAB / KOTA KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 178.000.000

1. MOTOR, HONDA D1B02N26L2AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, TOYOTA/RUSH RUSH 1.5S (F700RE-GMMFJ) Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 38.591.863**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 576.091.863**III. HUTANG** Rp. 413.787.333**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 162.304.530**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI MULYONO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 806664

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 975.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 192.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 1.192.500.000

III. HUTANG Rp. 42.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.150.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENIK SARJUMANAH
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 691075

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 630.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m²/200 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1800 m²/400 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 114.500.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 E M-CVT CKD/ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA CIC02N16M2 A/T / SPM.SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, VESPA SKUTIK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 27.250.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 17.500.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 789.250.000**III. HUTANG** Rp. 250.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 539.250.000**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAMZAH
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 510206

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.650.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/150 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 1.900.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/65 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	95.000.000
1. MOBIL, MAZDA MAZDA 2 HATCHBACK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	164.880.342
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.912.280.342
III. HUTANG	Rp.	522.252.793
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.390.027.549

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HEDI MUHAMMAD IDRIS
2. Jabatan : KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN SERTIFIKASI
3. NHK : 142057

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.999.470.000

1. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 309 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 100.500.000
4. Tanah Seluas 122 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 40.870.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 458.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 250.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 120.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 1.066.420.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.902.396.510

F. HARTA LAINNYA

Rp. 216.218.197

Sub Total

Rp. 5.554.504.707

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.554.504.707

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRA FATADONA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 154329

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.440.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m²/74 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/84 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 725.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/84 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 465.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 272.900.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.200.000
2. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 261.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 212.349.002**D. SURAT BERHARGA** Rp. 187.542.500**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 135.851.264**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 3.248.642.766**III. HUTANG** Rp. 176.800.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.071.842.766

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERIYANTO**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **409608**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	700.000.000
1. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/45 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	275.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER KF 71 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
2. MOBIL, RUSH MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO TECHNO MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.115.500.000
III. HUTANG	Rp.	300.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	815.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMANTO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 423474

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 605.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/89 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 165.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 165.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.685.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ GD3 / MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 1KP-MIO SOUL GT / SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SPORTY CBS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.685.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX / BBP A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 29.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.000.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 58.350.199**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 834.035.199

III. HUTANG Rp. 234.575.893



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

599.459.306

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2022/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRA SOFANY**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **874223**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **900.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **528.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA HARRIER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **30.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **65.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **1.523.000.000**

III. HUTANG Rp. **287.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.236.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRAS HIKMAWAN**
2. Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
3. NHK : **807013**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m ² /130 m ² di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	113.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000		
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	26.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	946.500.000
III. HUTANG	Rp.	173.950.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	772.550.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOENAEDY JAFAR
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 511631

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m²/135 m² di KAB / KOTA KOTA JAYAPURA , WARISAN Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 282.500.000

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA LIFT BACK Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, YAMAHA RX K Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR RODA 2 / SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU TERIOS 1.5 R M/T MINIBUS MB PENUMPANG Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 58.524.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 21.877.520**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 912.901.520**III. HUTANG** Rp. 278.936.824**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 633.964.696

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KASNO
2. Jabatan : KEPALA BALAI MONITOR
3. NHK : 894388

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 330.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m²/80 m² di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah Seluas 1980 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 180.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3E Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3E Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.500.000**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 288.527.954**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 823.027.954**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 823.027.954**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2020/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUSWAHYUDI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 423529

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.080.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/184 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 250.000.000		
4. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	226.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT/NC11BF1D A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.000.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	127.686.706
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.448.186.706
III. HUTANG	Rp.	30.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.418.186.706



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LATUSE
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 100263

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1.711.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKEP, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
3. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 266 m2 di KAB / KOTA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
5. Tanah Seluas 3140 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 170.625.000
6. Tanah Seluas 2770 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.125.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/130 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

291.570.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
3. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.570.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	99.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	949.934.831
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.052.254.831
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.052.254.831

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUTHFI
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 898134

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	79.500.000
1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 001 125 MT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	296.724.620
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.026.224.620
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.026.224.620

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. HELMI
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 758322

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.226.059.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 626.059.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 185.500.000

1. MOTOR, YAMAHA B5D AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV 1.5 S CVT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 36.100.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 45.388.541**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 188.976.309**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.682.023.850**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.682.023.850**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MANUELSON JAKA JUSUF
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 867879

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m ² /42 m ² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m ² /36 m ² di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.000.000
1. MOTOR, HONDA TIGER GL200R Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
2. MOBIL, DAIHATSU AYLA R DLX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	75.399.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	298.407.470
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	873.806.470
III. HUTANG	Rp.	209.405.907
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	664.400.563

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOH. SYARIF HELMI
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 410911

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.100.000.000
1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	221.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 1PA 150 CC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
3. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	175.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	55.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	362.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.913.000.000

III. HUTANG **Rp.** **65.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.848.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : R.M AGUNG HARIMURTI
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 845657

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

669.674.000

1. Tanah Seluas 774 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, WARISAN
Rp. 33.436.000
2. Tanah Seluas 1702 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL,
WARISAN Rp. 174.284.000
3. Tanah Seluas 1791 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL,
WARISAN Rp. 103.162.000
4. Tanah Seluas 1642 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL,
WARISAN Rp. 168.140.000
5. Tanah Seluas 941 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, WARISAN
Rp. 40.652.000
6. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000
7. Tanah Seluas 112 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

233.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA LI DELUXE Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO E Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

89.929.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	212.832.472
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.205.435.472
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.205.435.472

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD SOPINGI**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI MONITOR**
3. NHK : **65981**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

4.100.000.000

1. Tanah Seluas 336 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 898 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 408 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
9. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
10. Tanah Seluas 599 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



11. Tanah Seluas 432 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
12. Tanah Seluas 19000 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 118.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SKYWAVE SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 6.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 4.256.500.000**III. HUTANG** Rp. 47.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.209.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD TAKDIR
2. Jabatan : KEPALA LOKA
3. NHK : 894633

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp.****1.670.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/108 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA GOWA, WARISAN Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 838 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA GOWA, WARISAN Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 720 m2 di KAB / KOTA GOWA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 60.000.000
8. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp.****177.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BY8 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA X1H02N35MI Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.



15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	75.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	125.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.047.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.047.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUJIYO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 87396

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 780.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
2. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 134.400.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA GUNUNG Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 900.000
3. LAINNYA, POLIGON SEPEDA GUNUNG Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
4. MOTOR, YAMAHA SCOOTER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO SCOOTER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.870.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 316.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----



Sub Total	Rp.	1.240.270.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.240.270.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.